

Studi Literatur Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia

Ardila Prihadyatama

Politeknik Negeri Madiun

Handika Asep Kurniawan

Politeknik Negeri Madiun

Alamat: Jl. Serayu No.84, Pandean, Taman, Pandean, Kec. Taman,
Kota Madiun, Jawa Timur 63133

Korespondensi penulis: ardila@pnm.ac.id

Abstract. *This study aims to develop a roadmap for controlling regional inflation in Indonesia. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data in question is data sourced from interviews regarding the main tasks and functions of the Regional Inflation Control Team (TPID), while secondary data is data regarding changes in inflation in Indonesia from year to year sourced from BPS. This research method is descriptive research that utilizes literature from various related sources. The results of the study show the importance of coordination between the central government and regional governments in controlling regional inflation.*

Keywords: *Inflation and the Regional Inflation Control.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun roadmap pengendalian inflasi daerah di Indonesia. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang bersumber dari hasil wawancara mengenai tugas pokok dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sedangkan data sekunder adalah data mengenai perubahan inflasi di Indonesia dari tahun ke tahun yang bersumber dari BPS. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memanfaatkan literatur dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya koordinasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi daerah.

Kata kunci: Inflasi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan perekonomian diseluruh dunia, integrasi variabel makroekonomi menjadi sangat tinggi. Perubahan salah satu indikator makro akan menyebabkan dampak yang signifikan kepada indikator variabel makroekonomi. Seperti yang diketahui, beberapa variabel makro yang sering kali dibahas dan didiskusikan adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, suku bunga dan inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para ekonom untuk menganalisis perekonomian suatu negara. Inflasi menjadi variabel makro yang vital setidaknya dalam dua dekade terakhir. Dalam Pohan (2008) disebutkan bahwa inflasi memberikan dampak besar terhadap pencapaian beberapa

tujuan kebijakan makro, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Terkait hal diatas, tentunya inflasi bukan variabel makro yang dapat diremehkan begitu saja dalam struktur ekonomi suatu negara maupun daerah. Begitu vitalnya variabel inflasi, sehingga banyak negara yang menerapkan kebijakan moneter khusus untuk pengendalian inflasi. Seperti yang diaplikasikan di Indonesia sekarang ini, adalah Inflation Targeting Framework (ITF). Sejarah ITF sendiri bermula dari rumusan formula efektif untuk mengendalikan inflasi di negara maju yang disusun oleh International Monetary Funds (IMF) untuk meredam gejolak inflasi. Dalam pengaplikasiannya, ITF pertama kali diaplikasikan di Selandia Baru di tahun 1990an, dan terbukti efektif untuk meredam inflasi. Kemudian, ketika gejolak ekonomi terjadi di Indonesia di tahun 1997 (disebabkan krisis multidimensi di Asia), Indonesia mencoba menereapkan ITF sebagai alat pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen suku bunga dalam pengoperasiannya. Akan tetapi tidak mampu membuahkan hasil yang menggembirakan setidaknya hingga saat ini.

Berikutnya, timbul pertanyaan bahwa mengapa inflasi menjadi sesuatu yang sangat vital dalam struktur makroekonomi, yang seolah-olah menjadi ketakutan tersendiri bagi pemerintah manapun di seluruh dunia. Inflasi dianggap sebagai penyakit kronis yang berdampak besar jika tidak segera disembuhkan. Inflasi didefinisikan sebagai fenomena ekonomi yang menjadi pembahasan krusial karena mempunyai dampak yang amat luas dalam perekonomian makro. Inflasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi.

Pada dasarnya, inflasi bukan merupakan “penyakit” ekonomi yang harus dihilangkan, karena inflasi juga merupakan bukti adanya keberlangsungan kegiatan ekonomi yang tercermin melalui kenaikan harga. Kenaikan harga tersebut mampu menjadi pemicu tergeraknya sektor produksi di suatu negara maupun daerah. Inflasi harus dijaga tetap stabil agar tidak terjadi lonjakan (shock) yang akan berdampak pada perekonomian. Inflasi merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi yang tinggi akan

menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan, menambah angka kemiskinan, mengurangi tabungan domestik, menyebabkan defisit neraca perdagangan, menggelembungkan besaran utang luar negeri serta menimbulkan ketidakstabilan politik. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Mekanisme bekerjanya ITF adalah melalui penargetan inflasi yang diterapkan melalui beberapa saluran transmisi kebijakan moneter. Diantaranya adalah (i) Saluran Suku Bunga; (ii) Saluran Kredit; (iii) Saluran Nilai Tukar; (iv) Saluran Harga Aset; (v) Saluran Ekspektasi. Tujuan dari kebijakan ITF ini adalah agar mencapai inflasi yang rendah dan stabil.

Perkembangan inflasi Indonesia dari tahun 1995 hingga sekarang masih tergolong tinggi dan tidak stabil. Struktur ekonomi Indonesia masih lemah terhadap gejolak ekonomi yang terjadi sehingga seringkali permasalahan diluar ekonomi (misalnya kepentingan politik) kadangkala masih mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki tingkat perekonomian (dianggap) setara dengan Indonesia, misalnya Malaysia dan Thailand, kedua negara tersebut cenderung memiliki tingkat inflasi yang stabil. Terlepas dari besaran variabel makroekonomi yang lain yang tentu berbeda, hal ini sebenarnya menunjukkan keberhasilan pemerintah Malaysia maupun Thailand untuk mengendalikan inflasi agar tetap rendah dan stabil. Sedangkan untuk negara maju yang lain, misalnya Korea Selatan, Jepang dan China (kekuatan baru ekonomi Asia melalui sektor produksi yang berkembang pesat), kondisi inflasi cenderung terkendali dan stabil. Skala ekonomi yang berbeda menjadi salah satu penyebab perbedaan ini, sehingga kadangkala kebijakan yang berhasil di aplikasikan di negara tertentu perlu penyesuaian jika akan diaplikasikan di negara lain.

Penyusunan roadmap inflasi daerah merupakan guideline dalam program pengendalian inflasi secara terstruktur dan terintegrasi, guna menekan laju inflasi agar berada dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi dilaksanakan dengan pemantauan dan pengendalian harga. Mekanisme pemantauan dilakukan dengan:

(a) pemantauan produksi, distribusi, stok, dan harga komoditi strategis;

- (b) pemberian informasi perkembangan harga bulan sebelumnya dan perkembangan harga terkini;
- (c) pemetaan masalah produksi, distribusi, stok, dan harga; dan
- (d) pengendalian harga komoditi strategis. Mekanisme pengendalian harga dilakukan dengan:
 - operasi pasar;
 - perbaikan distribusi;
 - moral suasion pembentukan ekspektasi masyarakat; dan
 - usulan-usulan lainnya kepada kementerian terkait.

KAJIAN TEORITIS

Dalam bab kajian teoritis berikut ini, akan disajikan beberapa teori penting yang digunakan sebagai dasar acuan dari penyusunan roadmap inflasi.

A. Definisi Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak dialami oleh hampir semua negara. Yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu keadaan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus (Mankiw, 2006). Oleh sebab itu, kondisi semacam itu dianggap sebagai masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya fenomena inflasi memang tidak secara langsung menurunkan standar hidup, akan tetapi inflasi tetap menjadi “penyakit” dalam ekonomi karena dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi, dan dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat di jangka panjang.

Definisi lain mengenai konsep inflasi dijelaskan oleh Hagger (1977) inflasi didefinisikan sebagai “.. *a situation in which there is a persistent upward movement in the general price level...*” 2. Secara sederhana, inflasi dapat dijelaskan sebagai kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Berdasarkan teori ekonomi *New-Keynesian* tekanan inflasi dapat bersumber dari sisi permintaan, penawaran dan ekspektasi inflasi. Konsep ini dikenal pula dengan “*Expectation-Augmented Phillips Curve*”.

B. Penggolongan Inflasi

Dalam buku Kebanksentralan seri inflasi (Suseno dan Siti Astiyah, 2009) dan buku karya Supriyanto (2007), Inflasi digolongkan menjadi beberapa jenis. Berikut ini merupakan beberapa penggolongan inflasi:

- a. Penggolongan inflasi berdasarkan tingkatannya, yaitu terdiri dari :

- Inflasi ringan yaitu dibawah 10% setahun
 - Inflasi sedang yaitu antara 10%-30% setahun
 - Inflasi berat yaitu antara 30%-100% setahun
 - Hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali yaitu diatas 100% setahun.
- b. Penggolongan inflasi berdasarkan sebab-sebabnya, terdiri dari :
- Demand inflation* yaitu inflasi yang timbul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa (*aggregate demand*), disebabkan oleh beberapa hal seperti bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pencetakan uang, kenaikan permintaan ekspor, dan bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah. Sedangkan *Cost inflation* yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. *Cost inflation* terjadi jika biaya produksi naik, misalnya disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
- c. Penggolongan inflasi berdasarkan tempat asalnya, yaitu *Domestic Inflation* dan *Imported Inflation* :
1. **Inflasi berasal dari dalam negeri (*Domestic Inflation*)**

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul karena terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.
 2. **Inflasi berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*)**

Inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang timbul sebagai akibat dari kenaikan harga barang impor. Hal ini terjadi karena tingginya biaya produksi barang di luar negeri atau adanya kenaikan tarif impor barang.

C. Teori-teori Inflasi

Hingga saat ini, terdapat tiga teori yang paling umum digunakan untuk menjelaskan tentang inflasi. Ketiga teori yang dimaksud adalah Teori Kuantitas, Teori Keynes dan Teori Strukturalis. Ketiga kelompok teori tersebut menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi. Namun demikian, ketiga teori tersebut bukanlah teori inflasi yang lengkap yang mampu menjelaskan semua aspek penting dari fenomena proses terjadinya kenaikan harga barang. Secara lebih lengkap, penjelasan mengenai masing-masing teori inflasi dapat disimak pada uraian berikut ini.

a. Teori Kuantitas

Teori Kuantitas merupakan teori inflasi yang paling tua namun teori ini masih relevan jika diaplikasikan untuk menjelaskan inflasi di negara-negara berkembang.

Dalam teori kuantitas, inflasi terjadi disebabkan oleh adanya kenaikan Jumlah Uang yang Beredar (JUB) dan timbulnya psikologi (ekspektasi) masyarakat terhadap kenaikan harga.

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan Jumlah Uang yang Beredar (JUB) adalah inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Kejadian seperti ini misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga – harga untuk sementara waktu saja (tidak bersifat permanen). Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab awal dari kenaikan harga – harga tersebut.

Selain berkaitan dengan Jumlah Uang yang Beredar (JUB), laju inflasi juga ditentukan oleh psikologi (ekspektasi) masyarakat mengenai harga-harga di masa mendatang. Terdapat tiga skenario keadaan yang memungkinkan terjadinya ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga. Keadaan yang pertama adalah bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga – harga untuk naik pada periode mendatang. Kondisi kedua adalah dimana masyarakat (atas dasar pengalaman di periode sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi yang terjadi. Dan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi, pada tahap ini masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Fenomena hiperinflasi ini pernah terjadi di Indonesia selama periode 1961 – 1966.

b. Teori Keynes

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, dan menyoroti aspek lain dari inflasi (Boediono, 1998). Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok – kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang – barang selalu melebihi jumlah barang – barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut *inflationary gap*).

Inflationary gap timbul karena adanya golongan – golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang – barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang – barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut

mungkin juga pengusaha–pengusaha swasta yang menginginkan untuk investasi – investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank. Golongan tersebut biasa pula serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota – anggotanya melebihi kenaikan produktifitas buruh.

Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peperangan, program investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial. Menurut Sumiatun dan Jamli (2001), golongan non monetarist ini menambahkan bahwa peningkatan permintaan agregat dapat terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran konsumsi, peningkatan investasi swasta (karena suku bunga kredit murah), peningkatan pengeluaran pemerintah (yang dibiayai dengan pencetakan uang baru), atau kenaikan ekspor netto (karena kenaikan permintaan luar negeri terhadap barang-barang ekspor). Dengan demikian pemikiran Keynes tentang inflasi dapat dirumuskan menjadi :

$$\text{Inflasi} = f(JUB, EXP, i, I, EXM)$$

Dimana:

JUB : Jumlah Uang Beredar

EXP : Pengeluaran Pemerintah

i : Suku Bunga Kredit

I : Investasi

EXM : Ekspor netto

c. Teori Struktural

Teori Strukturalis adalah teori yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini menekankan pada ketegaran (infleksibilitas) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Melalui beberapa studi mengenai inflasi di negara berkembang, ditunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau cost push inflation. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negaranegara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris. Adanya guncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya term of trade; utang luar negeri; dan nilai tukar valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik. Selanjutnya,

jika ditulis dalam suatu persamaan fungsi maka penyebab inflasi menurut teori Struktural tersebut dapat dituliskan sebagai:

$$\text{Inflasi} = f(\text{harga barang dalam negeri, surplus/defisit neraca perdagangan, harga komoditas luar negeri, utang luar negeri, nilai tukar valuta asing})$$

Disamping ketiga teori penjas inflasi diatas, dalam Mankiw juga disebutkan bahwa inflasi yang diharapkan, deviasi pengangguran dari tingkat alamiah (pengangguran siklis), dan guncangan penawaran (*supply shock*). Hubungan ini terbentuk dalam sebuah kurva yaitu Kurva Phillips (*Phillips Curve*). Bentuk modern dari kurva Phillips ini cenderung menyesuaikan perkembangan ekonomi yang terjadi, misalnya kesadaran mengenai pentingnya harapan pada penawaran agregat, adanya keterkaitan antara inflasi harga dan inflasi upah, serta pentingnya memperhitungkan adanya goncangan terhadap penawaran agregat.

Kurva Phillips menjelaskan hubungan bahwa tingkat inflasi (π) ditentukan oleh inflasi yang diharapkan (π_e) (expected inflation), diskrepansi pengangguran pada tingkat alamiah (u^*) (natural rate of unemployment) dengan tingkat pengangguran actual (u_t), dan shocks dari sisi penawaran (v) (*supply shock*). Secara umum konsep tersebut dapat dituliskan menjadi:

$$\pi = \pi_e + (u^* - u_t) + v$$

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa ekspektasi inflasi seringkali dipengaruhi oleh inflasi pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, ekspektasi yang bersifat adaptif ditunjukkan pada persamaan di atas dengan menggunakan π_{t-1} sebagai variabel ekspektasinya. Dalam kurva Phillips juga ditunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang rendah akan mendorong inflasi ke atas akibat adanya tekanan dari kenaikan sisi permintaan (*aggregate demand*) sebagai demand pull inflation. Selain itu, inflasi juga disebabkan oleh adanya goncangan dari sisi penawaran, yaitu misalnya terjadi kenaikan harga pada input-input produksi, dengan demikian hal ini akan meningkatkan biaya produksi dan meningkatkan harga barang (*cost push inflation*). Pada konteks ini, asumsi terjadinya markup pricing di mana harga-harga barang ditentukan oleh perusahaan dengan berdasarkan pada biaya tenaga kerja. Maka, harga akan meningkat seiring dengan

semakin tingginya tingkat upah. Secara umum dikenal persamaan Kurva Phillips tersebut sebagai berikut:

$$\pi = \pi_e + \beta(y_t - y_t^*) + v$$

Dimana $(y_t - y_t^*)$ merupakan output gap yang merupakan selisih antara output aktual dengan output potensial, dan v adalah faktor supply shock. Dalam perkembangannya, berdasarkan kurva Phillips tersebut, Robert J. Gordon (1977) mengembangkan *Triangle Model of Inflation*. Secara umum, model ini dinyatakan dengan persamaan :

$$\Pi_t = a(L)\pi_{t-1} + b(L)D_t + c(L)Z_t + \varepsilon_t$$

Dimana:

π : laju inflasi

D : indeks yang menggambarkan excess demand

Z : vektor yang mewakili variabel supply shock

ε : error

Asumsi yang digunakan dalam ekspektasi inflasi adalah ekspektasi adaptif. Sementara itu, excess demand dalam persamaan di atas menggambarkan kondisi permintaan agregat terhadap penawaran agregat. Kondisi ekonomi dikatakan mengalami excess demand jika permintaan agregat tumbuh melebihi penawaran agregat. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan inflasi. Sebaliknya, bila permintaan agregat tumbuh di bawah pertumbuhan penawaran agregat, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat yang segera diikuti oleh penurunan inflasi. Beberapa variabel yang bisa digunakan sebagai proksi dari *excess demand* diantaranya adalah *output gap*, yaitu rasio antara output actual dengan potensial output riil. Selain itu, bisa juga digunakan *unemployment gap*, yaitu selisih antara tingkat pengangguran aktual dengan tingkat naturalnya. Alternatif lain adalah tingkat penggunaan kapasitas terpasang (*capacity utilization*). Penawaran agregat akan cenderung terus naik sejalan dengan kenaikan jumlah tenaga kerja, kapital, dan penguasaan teknologi. Dalam jangka panjang, output diyakini tumbuh secara konstan. *Supply shocks* termasuk salah satu determinan inflasi berdasarkan pertimbangan atas pengaruhnya terhadap kenaikan biaya produksi. Pada awal perkembangannya di era 1970-an, kurva Phillips belum memasukkan *supply shocks* sebagai determinan inflasi. Namun, pada saat terjadi krisis harga minyak di tahun 1970-

an dan 1980-an yang menyebabkan kenaikan biaya produksi dan mendorong laju inflasi dunia, maka *supply shocks* dianggap perlu masuk sebagai salah satu determinan inflasi. Beberapa variabel yang potensial untuk digunakan sebagai proksi bagi *supply shocks* ini diantaranya adalah harga impor, harga makanan, dan harga energi.

D. Pembentukan Inflasi

Tingkat harga ekuilibrium dalam perekonomian terjadi pada titik perpotongan antara kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Perpotongan antara dua kurva ini berhubungan dengan keseimbangan pada pasar barang dan pasar uang. Hampir semua ekonom setuju, bahwa peningkatan tingkat harga bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan atau kurva penawaran agregat bergeser ke kiri.

Inflasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat disebut inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*). Sementara inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya atau penawaran agregat disebut inflasi karena dorongan biaya (*cost push inflation*). Inflasi juga dapat disebabkan oleh adanya ekspektasi kenaikan harga (ekspektasi inflasi).

E. Stabilitas Harga dan Pengendalian Inflasi

1. Inflasi Rendah dan Stabil

Tujuan kebijakan ekonomi makro di berbagai negara maju dan berkembang adalah pencapaian suatu target inflasi dengan tingkat fluktuasi yang minimal. Inflasi yang rendah dan stabil mencerminkan stabilitas kondisi ekonomi makro. Faktor ini sangat penting bagi terselenggaranya proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian telah menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi meskipun pada suatu batasan tertentu inflasi merupakan indikasi berjalannya roda kegiatan ekonomi. Khan dan Senhaji dalam penelitiannya dengan menggunakan data 140 negara berkembang dan maju periode 1960 – 1998 menunjukkan bahwa inflasi yang melebihi batas tertentu (*threshold*) secara signifikan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. *Threshold* inflasi untuk negara maju antara 1 – 3%, sedangkan untuk negara berkembang 11 – 12%.

Inflasi yang cenderung tinggi berkaitan erat dengan besarnya variabel biaya yang harus dikeluarkan dalam aktivitas kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya menentukan tingkat efisiensi suatu perekonomian. Besarnya variabel biaya “ekstra” yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha ini akan mempengaruhi keputusan bisnis pengusaha

dalam melakukan ekspansi dan atau berproduksi. Situasi pergerakan inflasi yang berfluktuasi secara tajam menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha dalam menentukan rencana bisnisnya. Kondisi ini secara agregat berdampak pada peran investasi yang lebih konservatif dalam perekonomian dan menekan laju produktivitas kegiatan usaha (Fischer, 1993). Survei yang diselenggarakan oleh Bappenas⁵ menunjukkan bahwa inflasi sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi investasi baru. Tingginya inflasi maupun ketidakstabilannya akan dapat menghambat perkembangan investasi baru. Tingkat inflasi suatu negara turut menentukan daya saing ekspor dalam pasar internasional. Inflasi yang lebih tinggi relatif dibandingkan dengan inflasi di negara-negara pesaing dagang menyebabkan harga komoditas ekspor menjadi tidak kompetitif. Inflasi yang tinggi juga memicu turunnya pendapatan riil sehingga menggerus daya beli masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Barro (1995) menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan inflasi yang tinggi memiliki pengaruh yang negatif pada pendapatan per kapita masyarakat. Dalam jangka panjang, efek dari kenaikan inflasi ini secara substantif menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Implikasi negatif yang ditimbulkan dari ketidakstabilan dan kenaikan inflasi yang tinggi menjadi suatu konsensus bagi para pengambil kebijakan ekonomi makro dan bank sentral untuk menitikberatkan pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil sebagai tujuan utama kebijakan.

2. Kebijakan Moneter dalam Pengendalian Inflasi

Kebijakan moneter merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi makro dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap negara menerapkan strategi operasional kebijakan moneter yang diyakini paling sesuai dengan karakteristik dan fundamental ekonomi negara yang bersangkutan. Bank sentral dengan kebijakan moneternya diarahkan untuk mempengaruhi dinamika perekonomian di sisi permintaan.

Kebijakan moneter ekspansif biasanya ditempuh apabila bank sentral memandang kondisi perekonomian cenderung melambat, sehingga perlu “dorongan” yang dapat memacu roda kegiatan ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui penurunan suku bunga dan atau peningkatan jumlah uang beredar. Demikian sebaliknya dalam kondisi perekonomian yang “memanas”, antara lain ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi, inflasi yang meningkat, defisit neraca pembayaran yang melebar, maka bank sentral berupaya mengerem akselerasi kegiatan ekonomi yang terlalu

kencang dengan meningkatkan suku bunga dan atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Di Indonesia, strategi kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia dilakukan melalui penetapan BI Rate (policy rate) yang merupakan sinyal arah kebijakan yang ditempuh. Penetapan BI Rate ini akan mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan melalui berbagai jalur, yakni: suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi, yang selanjutnya memberi pengaruh pada inflasi. Gambar 1 menjelaskan transmisi kebijakan moneter di Indonesia.



Gambar 1 Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia

Sumber: Buku Petunjuk TPID, 2014.

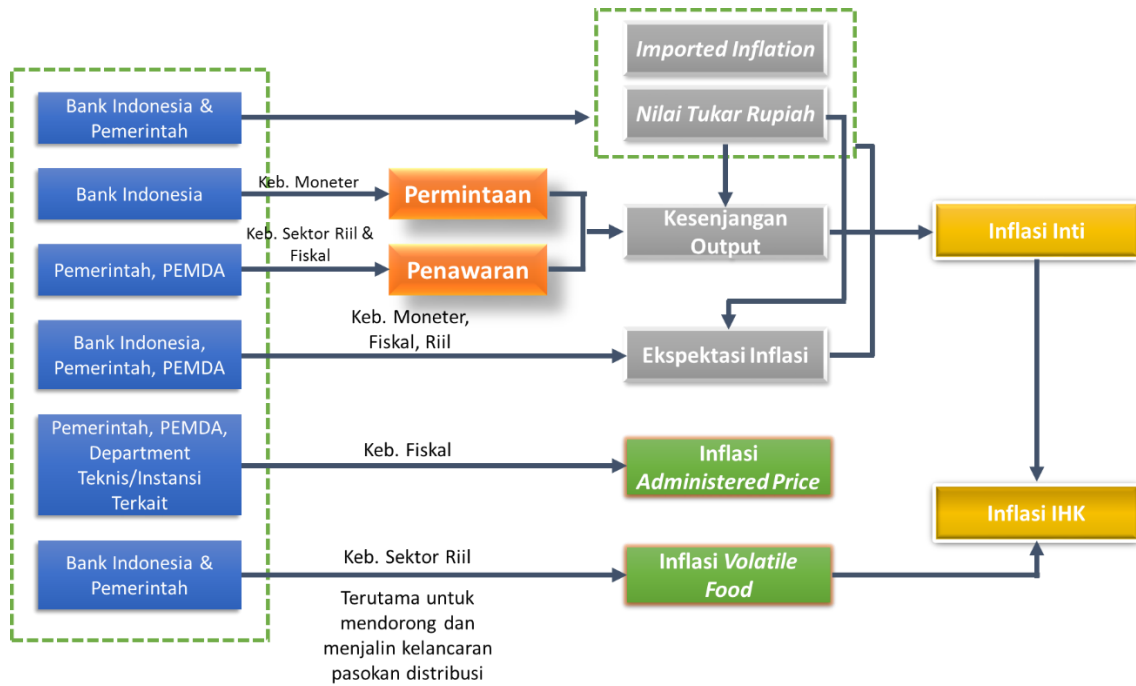
3. Koordinasi Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah

Inflasi merupakan fenomena perekonomian yang secara umum terjadi karena adanya dorongan faktor permintaan dan juga faktor penawaran. Upaya menurunkan inflasi secara efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah selaku otoritas fiskal dan pengambil kebijakan sektoral, serta Bank Indonesia sebagai penentu kebijakan moneter. Pentingnya peran koordinasi kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang diselenggarakan secara rutin untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Bank Indonesia juga secara rutin diundang dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI untuk memberikan pandangan terhadap perkembangan ekonomi makro dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara BI dan Pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran inflasi.

Dalam tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat pada tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan beberapa kementerian terkait di Pemerintah Pusat, yakni:

- (1) Kementerian Keuangan,
- (2) Kementerian ESDM,
- (3) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
- (4) Bulog,
- (5) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- (6) Kementerian Perhubungan,
- (7) Kementerian Pertanian,
- (8) Kementerian Perdagangan, dan
- (9) BPS.

Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 koordinasi pengendalian inflasi diperluas hingga ke level daerah yang beranggotakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya. Pada awalnya bentuk formal forum/tim koordinasi antar SKPD/instansi dalam rangka pengendalian inflasi daerah memiliki penamaan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, namun substansi dari tujuan beberapa forum/tim pengendalian yang telah terbentuk pada dasarnya adalah untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pemantauan dan pengendalian inflasi serta berupaya menciptakan stabilitas harga di daerah. Oleh karena itu untuk kemudahan dan penyederhanaan, terminologi kelembagaan koordinasi dan kerjasama antar SKPD/instansi terkait di daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilitas harga selanjutnya disebut dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).



Gambar 2 Strategi Kebijakan untuk mempengaruhi Inflasi

Sumber: Buku Petunjuk TPID, 2014.

Pembentukan TPID yang cukup pesat dalam periode 2008-2010 memunculkan desakan dari Pemerintah Daerah untuk: (i) memperkuat dasar hukum pembentukan TPID dalam kaitannya dengan perencanaan dan anggaran daerah, dan (ii) fungsi koordinasi TPID dengan Pemerintah Pusat karena permasalahan pengendalian inflasi di daerah perlu mendapat dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga pada 2011 dilakukan kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU) antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia, dimana salah satu tindak lanjutnya adalah membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID, dengan maksud (i) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung upaya stabilisasi harga di daerah, (ii) sinergi sumber daya dalam rangka koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan inflasi daerah. (iii) pertukaran data dan informasi yang terkait dengan upaya stabilisasi harga di daerah.

Peran strategis Pokjanas TPID semakin dirasakan seiring bertambahnya jumlah TPID dan kompleksitas permasalahan yang mempengaruhi stabilitas harga di daerah. Upaya stabilisasi harga membutuhkan “extra efforts”, yang memerlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor, lintas kementerian, dan melibatkan pemerintah pusat maupun daerah. Berkembangnya jumlah TPID, membutuhkan penguatan mekanisme business process dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, hingga di level pusat yang

dikoordinasikan oleh Pokjanas TPID. Adapun Jumlah TPID yang telah terbentuk secara formal (melalui Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati) sampai dengan akhir Februari 2014 tercatat sebanyak 197 TPID.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu:

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Hasan, 2002). Berdasarkan caranya, maka pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang koordinasi pemerintah daerah dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengenai pembagian tugas dan wewenang dalam mengatasi gejolak inflasi daerah.

B. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumbernya langsung, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data baku yang diperoleh pada Instansi atau Organisasi yang ada, baik pemerintah maupun swasta serta kajian literatur dari berbagai pustaka (Muslimin, 2002). Sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi meliputi Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten, Badan Pusat Statistik dan instansi-intansi terkait serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian ini.

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan *multiple source of evidence*, yaitu kuesioner, wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. Masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Observasi. Observasi yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian guna memperoleh bahan dan data-data yang diperlukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mempergunakan studi literatur sebagai bahan dasar analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah perangkat

umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan, termasuk permasalahan yang dihadapi oleh monitoring (Johnson, dkk, 1989; Bartol dkk, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai formulasi disusun guna menjaga inflasi tetap stabil. Stabil yang dimaksud merupakan kondisi yang tidak fluktuatif (memiliki tren yang konstan sepanjang waktu). Menjaga inflasi tetap stabil (konstan) dirasa bukan perkara mudah, mengingat inflasi merupakan variabel ekonomi yang dinamis yang mampu berdampak luas di berbagai elemen masyarakat. Selama ini pengaturan inflasi (nasional) maupun daerah dibebankan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Pusat melalui pelimpahan wewenang kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mendapat mandat dalam pengendalian harga-harga (inflasi) agar tetap stabil¹.

Beberapa pihak menganggap tugas yang diwenangkan ini cukup *remeh temeh* sehingga ketika terjadi kegagalan dalam pengendalian inflasi, Bank Indonesia selalu menjadi *kambing hitam* dalam perekonomian. Pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dalam skala makro merupakan kebijakan penargetan inflasi yang dicantumkan dalam kerangka moneter yaitu Inflation Targeting Framework (ITF). ITF merupakan kerangka moneter yang cukup “baru” dalam sejarah perekonomian Indonesia, karena kerangka kebijakan moneter ini baru diaplikasikan pada tahun 2000 setelah melihat keberhasilan negara-negara maju mengendalikan inflasi melalui kerangka moneter ini. Mekanisme pengaplikasian ITF ini melalui transmisi kebijakan moneter dengan menggunakan beberapa jalur, sebagaimana yang telah diungkapkan pada latar belakang.

Dengan merujuk keberhasilan negara-negara maju dalam pengaplikasian ITF, tentunya Indonesia mempunyai harapan yang sama dalam pengendalian inflasi. Selama 16 tahun pengaplikasian ITF, BI dianggap masih belum berhasil dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Bank Indonesia selaku pengambil kebijakan terkait inflasi.

A. Sejarah Berdirinya Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik

inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, *shocks* terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap *shocks* tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) mulai tahun 2008.

Selanjutnya, untuk mengkoordinasikan tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Pokjanas TPID merupakan sinergi dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri.

B. Tugas dan Peran TPID

Seperti yang tercantum dalam Buku Manual TPID (2014), Tugas dan kewajiban TPID sebagaimana tercantum dalam lampiran Inmendagri adalah sebagai berikut:

1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
2. Memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
5. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;

6. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan Inflasi di daerahnya;
7. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
8. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
9. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
10. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat:
 - a. Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
 - b. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 - c. Rumusan rekomendasi kebijakan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. Rencana program kerja tahun berikutnya.
13. TPID Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.

C. Mekanisme Kerja

Tim Pelaksana melakukan pemantauan secara rutin perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi di level teknis. Hasil pemantauan tersebut kemudian disampaikan kepada Komite Kebijakan bersama dengan usulan rencana aksi dan rekomendasi kebijakan kepada Komite Kebijakan. Komite kebijakan kemudian mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan kepada Tim Pelaksana terkait pelaksanaan tugas Pokjanas TPID dalam rangka mengatasi permasalahan inflasi daerah.

Dalam hal usulan ataupun rekomendasi kebijakan yang disampaikan bersifat strategis dan membutuhkan keputusan di level yang lebih tinggi, Komite Kebijakan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Pengarah. Adapun fungsi Sekretariat dalam Pokjanas TPID adalah menatausahakan kegiatan dan dokumen, menyelenggarakan rapat, serta melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya. Sekretariat Pokjanas TPID saat ini disepakati bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rapat koordinasi di tataran teknis, pada tingkat pelaksana, dilakukan secara rutin sekali dalam sebulan untuk membahas berbagai isu terkait perkembangan harga di daerah dalam bulan berjalan. Sementara rapat Komite Kebijakan diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun untuk membahas isu-isu strategis terkait kebijakan harga di daerah. Rapat koordinasi Komite Kebijakan dilaksanakan apabila terdapat hal-hal penting dan strategis yang memerlukan keputusan ataupun menghasilkan kebijakan dalam lingkup nasional.

Dalam kerangka penguatan koordinasi dan kerjasama, Pokjanas TPID juga memfasilitasi berbagai kegiatan forum koordinasi. Di tingkat nasional, Pokjanas TPID menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID yang merupakan wadah pertemuan seluruh TPID se-Indonesia. Forum koordinasi juga diselenggarakan dalam lingkup antar wilayah melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), serta melalui Rapat Koordinasi Pusat-Daerah Berbagai forum koordinasi ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan pengendalian harga yang perlu menjadi prioritas untuk ditangani. Beberapa rekomendasi solusi yang dihasilkan dan memerlukan penanganan langsung dari Pemerintah Pusat dikomunikasikan oleh Pokjanas TPID kepada Kementerian/Lembaga terkait.

D. Tugas dan Peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian Inflasi

Koordinasi antara tugas dan peran Pemerintah Daerah dengan TPID sangat penting. Hal ini terkait dengan ranah kebijakan yang akan di ambil oleh masing-masing instansi. Koordinasi tersebut juga membahas mengenai kohorensi wewenang antara Pemerintah Daerah dan TPID.

Kerja sama dalam pengendalian inflasi di berbagai daerah akan sukses apabila pemerintah daerah (Pemda) terlibat aktif dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kerja sama tersebut diyakini juga akan sukses apabila Pemda melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan inflasi, misalnya kondisi cuaca, kondisi panen dan distribusi panen. Apabila inflasi di daerah sudah terjaga, maka pemerintah pusat akan mudah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi.

Peran daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga mengingat karakteristik inflasi Indonesia yang masih dipengaruhi oleh gejolak di sisi pasokan (*supply side shocks*). Terjaganya inflasi daerah pada tingkat yang rendah dan stabil akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. Hal ini didasari kenyataan bahwa inflasi nasional merupakan agregasi dinamika pembentukan harga yang terjadi di daerah. Terciptanya inflasi yang rendah dan stabil pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan dapat lebih menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Namun, berbagai permasalahan struktural yang masih terjadi seperti konektivitas yang rendah, struktur pasar yang terdistorsi, kesenjangan informasi harga dan produksi pangan menyebabkan pergerakan inflasi sangat rentan berfluktuasi. Efisiensi perekonomian daerah yang berbeda antara kawasan barat dan kawasan timur juga menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup besar.

Dalam rentang 10 tahun terakhir dapat terlihat bahwa pergerakan inflasi yang signifikan lebih disebabkan oleh faktor adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkait harga (*administered prices*) dan lonjakan harga komoditas pangan (*volatile foods*). Karakteristik inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan di sisi pasokan (*supply side*) tersebut menyebabkan upaya untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter, melainkan diperlukan adanya suatu paduan kebijakan yang harmonis antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan sektoral dan daerah. Hal inilah yang menjadi latarbelakang ditempuhnya strategi penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) hingga Pemerintah Daerah dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Keberadaan forum koordinasi dalam wadah TPID di berbagai daerah menjadi sangat strategis di tengah semakin besarnya kewenangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Koordinasi yang dijalin melalui TPI/TPID sejauh ini telah dapat menghasilkan berbagai rumusan kombinasi kebijakan lintas sektor dan daerah yang mendukung terciptanya stabilitas harga. Perhatian dan dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah tercemin pada pesatnya peningkatan jumlah daerah yang membentuk TPID dan semakin intensifnya kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan di berbagai daerah.

E. Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah

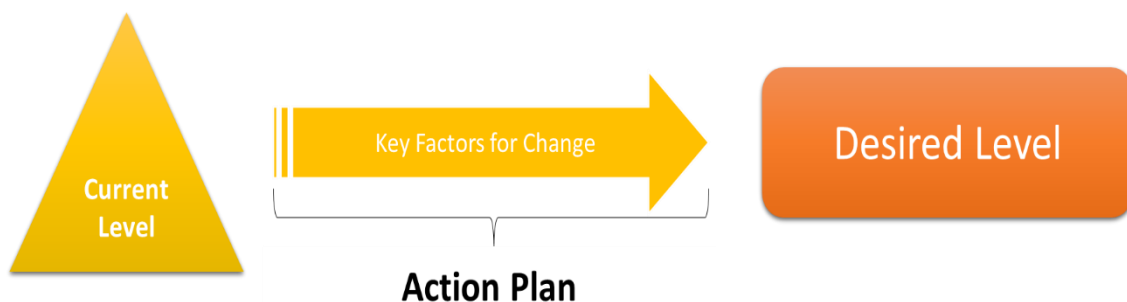
1. Gap Analysis

Menurut Prakash Pol dan Madhup Paturkar dari Infosys (2011), Fit & Gap Analysis merupakan sebuah metodologi yang membandingkan, mengevaluasi dan

mendata proses dalam perusahaan dan fungsi dari sistem untuk menemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian antara keduanya.

Gap analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Metode ini merupakan alat evaluasi bisnis yang menitikberatkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, misalnya yang sudah tercantum pada rencana bisnis atau rencana tahunan pada masing-masing fungsi perusahaan. Analisis kesenjangan juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Selain itu, analisis ini memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan perusahaan yang diharapkan.

Dalam mempelajari fenomena inflasi di daerah, tentunya harus mempelajari dahulu mengenai kondisi sesungguhnya mengenai gambaran-gambaran ekonomi yang berkaitan. Data maupun gambaran ekonomi yang telah tersedia ini akan dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan (kondisi ideal). Selanjutnya jika ditemukan “selisih” antara apa yang terjadi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, maka harus dipelajari sebab-sebab mengapa kondisi ideal tersebut belum dapat tercapai. Sehingga, jika sudah diketahui penyebabnya, maka dapat dirumuskan *action plan* yang akan dilaksanakan guna mempersempit *gap* tersebut. Berikut ini akan digambarkan diagram mengenai langkah-langkah dalam melakukan *gap analysis*.



Gambar 3 Alur Gap Analysis

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2022

Dalam menyusun roadmap inflasi daerah, pertama harus dipelajari mengenai penyebab inflasi yang tidak stabil. Terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap inflasi daerah, diantaranya adalah ekspektasi masyarakat, jalur distribusi barang dan jasa, tingkat pengangguran dan harga BBM. Berkaitan dengan variabel ekspektasi masyarakat dan distribusi barang, merupakan variabel yang berpengaruh terhadap

inflasi di daerah cukup besar. Hal ini dikarenakan ekspektasi dan distribusi barang dan jasa melibatkan banyak faktor yang mempengaruhi. Sehingga, jika inflasi di daerah diharapkan stabil, maka dua variabel ini haruslah dikendalikan.

2. Rencana Pengembangan

Rencana pengembangan yang dirumuskan tentunya didasarkan pada gap (selisih) antara kondisi sekarang (*current level*) dengan keadaan yang diharapkan (*desired level*). Rencana pengembangan ini merupakan langkah yang perlu diambil ketika perbedaan antara kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan telah ditemukan. Ada beberapa faktor yang mampu menjelaskan fenomena inflasi di daerah, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan langkah riil yang akan diambil (program kerja) yang telah diatur sesuai dengan pencapaian target yang diharapkan. Adapun roadmap pengendalian inflasi daerah yang akan disusun mengacu pada 5 pilar strategi pengendalian inflasi Jawa Timur, yang sering disebut “GADIS REMO KANGEN”, diantaranya adalah: (a) Penguatan Kelembagaan; (b) Produksi, Distribusi dan Konektifitas; (c) Regulasi dan Monitoring; (d) Kajian dan Informasi; serta (e) Pengendalian Ekspektasi.

a. Penguatan Kelembagaan

Sinergitas Pemerintah daerah dan TPID dapat di wujudkan melalui penguatan kelembagaan yang melalui koordinasi dengan jajaran instansi terkait untuk melakukan High Level Meeting TPID Jawa Timur dalam rangka mendorong penguatan kelancaran distribusi dan konektivitas antar wilayah melalui percepatan implementasi Program Kerjasama Antardaerah dengan optimalisasi peran BUMD dalam memperkuat lembaga *buffer* daerah.

b. Produksi, Distribusi dan Konektivitas

Produksi (penawaran) barang di daerah harus terjaga agar tetap stabil. Kelangkaan supply barang menyebabkan naiknya harga barang tersebut. Selain itu, distribusi barang dari produsen ke konsumen hendaknya dapat berjalan lancar sehingga dapat mengurangi *transportation cost* yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang.

c. Regulasi dan Monitoring

Regulasi dan monitoring dilaksanakan melalui wewenang TPID dan Pemerintah daerah, dimana TPID mengatur regulasi terkait kebijakan moneter dan Pemerintah daerah mengatur kebijakan fiskal.

d. Kajian dan Informasi

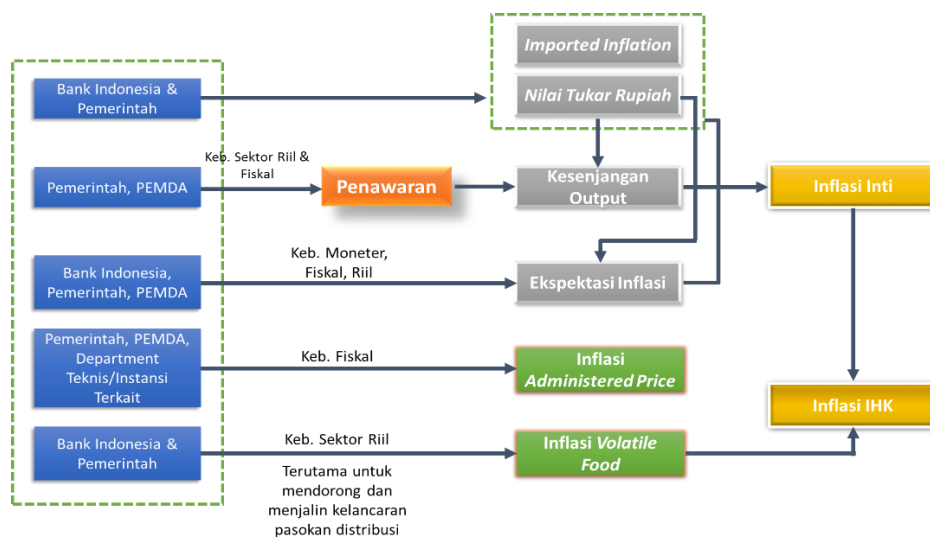
Kajian berkaitan dengan inflasi sangat diperlukan untuk mendeteksi penyebab inflasi yang berfluktuasi di suatu daerah, hal ini mungkin dilakukan karena inflasi merupakan variabel makro yang sangat dinamis dan sulit diprediksi.

e. Pengendalian Ekspektasi

Fluktuasi dari inflasi sangat ditentukan oleh ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di masa depan. Ketidak pastian ekonomi, mampu membuat kondisi pesimis dari masyarakat, sehingga inflasi akan cenderung tinggi.

F. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Inflasi Daerah

Strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian inflas dirumuskan merujuk dari apa yang sudah tertuang di aturan manual Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Kerangka strategi yang dimaksud adalah dengan mengkhususkan peran dari pemerintah daerah melalui peran dalam kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengacu pada wilayah dan wewenang yang dapat dijangkau oleh pemerintah daerah dengan maksud pengendalian inflasi Pemerintah daerah agar tetap rendah dan stabil.



Gambar 4 Strategi Kebijakan Pemerintah daerah untuk mempengaruhi Inflasi

Sumber: Buku Petunjuk TPID (dimodifikasi), 2014.

Dalam bagan diatas, dapat dilihat bahwa pelaku/pengambil kebijakan memerlukan koordinasi antar instansi satu dengan yang lainnya. Untuk pengendalian inflasi yang disebabkan oleh faktor eksternal (*imported inflation* dan nilai tukar) Pemerintah daerah tidak mampu berkontribusi langsung karena ranah ini merupakan kebijakan yang diambil

oleh Pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Peran langsung pemerintah daerah terlihat langsung dalam perumusan kebijakan sektor riil yang mampu berdampak langsung kepada penawaran barang (meambah supply atau mengurangi supply) sehingga kesenjangan output mampu diatasi, dan berdampak kepada inflasi. Dalam pengendalian faktor inflasi yang lain, misalnya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi, diperlukan sinergitas antara kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan riil, dimana Pemerintah pusat, daerah dan Bank Indonesia harus berkoordinasi untuk menciptakan optimisme masyarakat di masa depan terhadap inflasi. Faktor ekspektasi ini sangatlah kompleks, karena selain berdampak kepada inflasi dalam negeri, juga akan mempengaruhi kebijakan luar negeri terkait dengan nilai tukar.

Pelaksanaan kebijakan fiskal terkait pengendalian inflasi tidak hanya berhenti pada peran pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan, akan tetapi koordinasi antar SKPD dan instansi yang teknis berkaitan dengan pengaplikasian kebijakan fiskal sangatlah penting. Sehingga permasalahan-permasalahan hulu hilir dalam pengendalian inflasi dapat teratasi, misalnya kelancaran pasokan yang mampu berdampak pada kesenjangan output.

G. Rencana Aksi Pengendalian Inflasi

Rencana aksi pengendalian inflasi adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para instansi terkait (Pemda, BI, TPID dan SKPD terkait) dengan menggunakan sejumlah sumber daya pada kurun waktu dan lokasi tertentu dengan metode tertentu pula dalam rangka pengendalian inflasi yang bersinergi satu sama lainnya. Rencana aksi merupakan kompilasi dari kegiatan-kegiatan seluruh instansi terkait, dimana masing-masing kegiatan didasarkan pada hasil kajian yang dilaksanakan terkait komoditas-komoditas yang memiliki andil inflasi/deflasi dan nilai bobot komoditas pada kurun waktu tertentu terjadinya inflasi/deflasi tersebut. Berikut ini adalah rencana aksi pengendalian inflasi di daerah yang diidentifikasi melalui bobot penyumbang inflasinya.

Tabel 1 Kelompok dan Sub Kelompok Indeks Harga Konsumen

No	Isu Strategis	Rekomendasi
1.	Menjaga dan mengelola ekspektasi masyarakat terhadap dampak inflasi	- Mengetahui lebih dini mengenai fluktuasi inflasi sehingga bisa menekan laju inflasi. - Melaksanakan implementasi atau pengembangan lanjutan Pusat informasi harga pangan
2.	Menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga beras	- Memperluas peran BULOG dalam menyerap dan menyalurkan beras. - Pendirian BulogMart - Meningkatkan produksi padi daerah - Meningkatkan cadangan beras saat panen raya.
3.	Menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	- Melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha/distributor dan agen terkait dengan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok - Melaksanakan pasar murah pada daerah-daerah yang kurang terjangkau. - Operasi pasar murah menjelang hari raya, natal dan tahun baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).

Permasalahan inflasi merupakan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh satu pihak saja. Ada banyak pihak yang berperan dalam pengendalian inflasi agar sesuai dengan yang diharapkan. Namun, permasalahan lain timbul ketika interaksi antar instansi yang

berkepentingan mampu menyebabkan tumpang tindih tugas dan wewenang. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku regulator perbankan di Indonesia, membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berfungsi untuk mengatasi gejolak inflasi di masing-masing daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Barro, R. J. and X. Sala-I-Martin. 1995. *Economic Growth*. Singapore: McGraw-Hill International Editions.
- Bartol, K.M., & Martin, D.C., (1991), *Management*, New York: McGraw Hill, Inc.
- Boediono. 1998. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.
- Buku Petunjuk TPID. (2014). *Peran Strategis Pengendalian Inflasi Daerah*. Jakarta: Pokjanas TPID.
- Hager, Michael. 1973. *Development Lawfor the Developing Nations*. (Cote D'Ivoire: Makalah disampaikan dalam Working Paper for The Word Peace Through Law Conference, Abidjan).
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Johnson, G., Scholes, K., & Sexty, R.M., (1989), *Exploring Strategic Management*, Scarborough, Ontario: Prentice Hall.
- Mankiw, N. Gregory (2006), *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga. Salemba Empat Jakarta
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pol, Prakash, Madhup Paturkar. (2011). *Methods of Fit Gap Analysis in SAP ERP Projects*.
- Suseno dan Siti astiyah. (2009). *Inflasi*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
- Sumiatun, dan Ahmad Jamli. 2001. *Estimasi Beberapa Faktor yang Berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia 1988.IV-1999.IV Pendekatan Backward Looking dan Forward Looking*, *Sosiohumanika*, 14 (3), September 2001, hlm. 637-666.